

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN Provinsi Sulawesi Tenggara

2012-2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN Provinsi Sulawesi Tenggara

2012-2016



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGGUNAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2012 - 2016**

ISBN : 9786025407017
Nomor Publikasi : 74550. 1702
Katalog BPS : 9302002. 74

Ukuran Buku : 21,5 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 82 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Dicetak Oleh: CV Metro Graphia Kendari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*Industry*), pendekatan penggunaan/permintaan akhir (PDRB menurut Penggunaan/*Expenditure*), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*Income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan penggunaan/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Kendari, Juli 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tenggara,



Ir. ATQO MARDIYANTO, M.Si

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

<https://sultra.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Pendapatan Regional	3
1.2 Statistik Pendapatan Regional.....	4
BAB II RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT)	11
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	16
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori	22
2.6 Ekspor Impor Luar Negeri	26
2.7 Ekspor Impor antar Provinsi	29
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA BERDASARKAN PDRB PENGGUNAAN 2012-2016	31
3.1 Tinjauan Agregat PDRB menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara	33
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	37
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	41
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	42
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	45
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	47

3.7	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	48
3.8	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	49
3.9	Perkembangan Net Ekspor antar Provinsi	51
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGGUNAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2012-2016	53
4.1	PDRB (Nominal)	55
4.2	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	56
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB.....	57
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	57
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	58
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	59
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	60
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	61
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	62
4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	63
	PENUTUP	65
	LAMPIRAN	69
	DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	33
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	34
3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	35
4	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	36
5	Indeks Implisit PDRB menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	37
6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	38
7	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	39
8	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	40
9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	41
10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	42
11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	43
12	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	44
13	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	46
14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	47

15	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	49
16	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	50
17	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	55
18	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor 2012-2016.....	56
19	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB 2012-2016.....	57
20	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	58
21	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) 2012-2016.....	58
22	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	59
23	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	60
24	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	61
25	Rasio Perdagangan Internasional, Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	62
26	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> , Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	64

DAFTAR GRAFIK

Gambar	Judul	Halaman
1	Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016	34

<https://sultra.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran	Uraian	Halaman
Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	71
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	72
Tabel 3	Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	73
Tabel 4	Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	74
Tabel 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	75
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	76
Tabel 7	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	77
Tabel 8	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	78
Tabel 9	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	79
Tabel 10	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2016.....	80

BAB I
PENDAHULUAN

<https://sultra.bps.go.id>

1.1 Pengertian Pendapatan Regional

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan dimaksudkan untuk mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah pada suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah pada suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Penggunaan

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep penghitungan dengan ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka PDRB yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan akan sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 Statistik Pendapatan Regional

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data kelompok ini antara lain adalah:

1. Nominal PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan komunikasi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB Penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://sultra.bps.go.id>

BAB II
RUANG LINGKUP
DAN METODE PENGHITUNGAN

<https://sultra.bps.go.id>

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)

A. Ruang Lingkup

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga dipandang sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993).

PKRT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa baik dengan cara membeli, menerima transfer, atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk konsumsi; dikurangi hasil penjualan neto barang bekas atau afkiran pada periode waktu tertentu. PKRT mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik penduduk yang bersangkutan. Barang dan jasa yang dikonsumsi antara lain dalam bentuk:

- makanan dan minuman, baik bahan makanan maupun makanan jadi termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;
- perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa atau kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
- bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;
- barang tahan lama, seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- jasa-jasa, seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus, dsj.), ongkos transport, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket tempat rekreasi, ongkos pembantu rumah tangga;
- barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- barang dan jasa yang dibeli secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk di luar wilayah atau di luar negeri termasuk sebagai konsumsi rumah tangga dan

diperlakukan sebagai transaksi impor; sedangkan pembelian langsung oleh bukan penduduk di suatu wilayah diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah yang bersangkutan (UN, 1993).

Pembelian barang yang tidak ada duplikatnya (tidak diproduksi kembali), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lain diperlakukan sebagai investasi barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

Diperhitungkannya nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa sewa rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang diperhitungkan adalah ongkos sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga tidak termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh pengeluaran yang dimaksud antara lain adalah pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Demikian halnya pengeluaran rumah tangga untuk keperluan transfer dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh institusi rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam 12 (dua belas) kelompok COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*).

B. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT selama ini didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena data pengeluaran rumah tangga dari Susenas cenderung *underestimate* khususnya untuk kelompok bukan makanan dan makanan jadi, maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai yang diperoleh dari berbagai sumber di luar Susenas. Cara yang dilakukan adalah menggantikan (*me-replace*) hasil Susenas dengan hasil penghitungan data sekunder atas komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Asumsinya, bahwa penghitungan data sekunder lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas akan menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (*adhb*). Untuk memperoleh konsumsi rumah tangga harga konstan 2010, PKRT harga berlaku terlebih dahulu dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP. Konsumsi rumah tangga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dengan deflator IHK 12 kelompok COICOP yang sesuai.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPR)

A. Ruang Lingkup

Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) mencakup berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, yang secara prinsip bertujuan untuk biaya operasional atau pengeluaran dalam melayani rumah tangga. Pengeluaran konsumsi LNPR digolongkan sebagai bagian dari pengeluaran konsumsi akhir yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan lembaga. LNPR merupakan satu entitas legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan layanan atau pemberian jasa kepada rumah tangga (*non-market*). Sebagian besar kegiatan lembaga bersumber dari sumbangan atau donasi rumah tangga. Umumnya pekerja yang aktif dalam kegiatan lembaga merupakan tenaga kerja tidak dibayar (*volunteer*). LNPR merupakan bagian dari Lembaga NonProfit (LNP) secara keseluruhan. Sesuai dengan fungsinya ada LNP yang melayani rumah tangga, dan ada juga yang melayani bukan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud LNPR adalah LNP yang khusus melayani rumah tangga.

Dalam SNA'93, LNPR diperlakukan sebagai sektor institusi (pelaku ekonomi) tersendiri di luar institusi rumah tangga, pemerintah, korporasi, dan luar negeri atau luar wilayah. Dari penggolongan di atas dapat dilihat bahwa kegiatan lembaga nonprofit dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Lembaga nonprofit yang menghasilkan jasa komersial dan lembaga nonprofit yang menghasilkan jasa non-komersial.

Ciri-ciri unit lembaga nonprofit adalah sbb:

- lembaga nonprofit umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga;
- setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis.

Dengan demikian lembaga nonprofit sebagai induk dari LNPRT adalah lembaga yang keberadaannya bersifat formal ataupun informal yang dibentuk oleh perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah atau dunia usaha dalam rangka menyediakan jasa sosial kemasyarakatan bagi anggota maupun kelompok masyarakat tertentu tanpa adanya motivasi untuk memperoleh keuntungan. Tujuan pembentukannya tidak dimaksudkan sebagai sumber pendapatan ataupun profit bagi unit yang mengontrol dan membiayainya.

Lingkup LNP yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bentuk organisasi yaitu: organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi sosial (Orsos), organisasi profesi (Orprof), perkumpulan sosial/kebudayaan/olah raga/hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

a. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan fungsi, dan terdiri dari:

- ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ICMI,
- ormas kepemudaan, seperti KNPI, HMI, Pemuda Pancasila,

- ormas wanita, seperti Fatayat, Kalyana Mitra Wanita, dan
- ormas lainnya seperti Kosgoro, Partai Politik, dan Pepabri.

b. Organisasi Sosial (Orsos)

Organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, dan terdiri dari panti asuhan, panti wreda, panti lainnya, seperti yayasan pendidikan anak cacat (YPAC), panti tuna netra, dan sejenisnya.

c. Organisasi Profesi (Orprof)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sebagai wahana pengabdian masyarakat, dan terdiri dari:

- Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Sosial, seperti: ISEI, Ikatan Akuntan Indonesia, dan sejenisnya.
- Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Pasti, seperti PII, IDI, dan sejenisnya.

d. Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga/Hobi

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat mengembangkan kemampuan/apresiasi budaya, olahraga, hobi, kegiatan yang bersifat sosial, dan terdiri dari:

- Perkumpulan sosial seperti Perkumpulan Rotari Indonesia, WIC;
- Organisasi Kebudayaan seperti Padepokan Seni dan Budaya, Himpunan Penghayat Kepercayaan;
- Organisasi Olahraga seperti PSSI, PBSI, Ikatan Motor Indonesia; dan
- Organisasi Hobi seperti Ikatan Penggemar Anggrek, ORARI, dan Wanadri.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas dasar kemandirian atau swadaya, dan terdiri dari:

- LSM Penyebar Informasi seperti PKBI, YLKI, Walhi;
- LSM Pendidikan dan Pelatihan seperti LP3ES, Yayasan Bina Swadaya;
- LSM Konsultasi dan Advokasi seperti YLBHI;

- LSM Penelitian dan Studi Kebijakan seperti Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI);

f. Lembaga Keagamaan

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, mengembangkan, mensyiarkan agama, dan terdiri dari:

- Organisasi Islam, seperti Lembaga Dakwah, Remaja Masjid, Majelis Taklim;
- Organisasi Kristen/Protestan, seperti PGI, KWI, HKBP;
- Organisasi Hindu/Budha seperti Walubi, Parisadha Hindu Dharma;
- Perkumpulan Jamaah Masjid;
- Perkumpulan Jemaat Gereja/tempat ibadah lain;
- Pondok pesantren tradisional, seminari, dan sejenisnya.

g. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa

Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan kepada korban bencana atau penerima beasiswa atas dasar kemanusiaan, cinta sesama, solidaritas, dan terdiri dari:

- Lembaga Bantuan Kemanusiaan, seperti Yayasan Kesejahteraan Gotong Royong, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat;
- Lembaga Bantuan Pendidikan seperti GNOTA, Yayasan Supersemar;
- Lembaga Bantuan Lainnya

B. Metode Penghitungan

Sumber data untuk menghitung PKLNPRT tahunan *adhb* terdiri dari:

- Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis input pengeluaran.
Data ini berasal dari Survei Khusus Lembaga Non-profit dengan sampling unit LNPRT dan *lag* survei satu tahun (SKLNP 2011 merupakan data LNPRT 2010). Survei ini dilaksanakan setiap tahun di beberapa propinsi. Untuk propinsi yang terkena sampel dapat menggunakan data tersebut dalam penghitungan. Sedangkan untuk propinsi yang tidak terkena sampel, maka dapat digunakan hasil SKLNP propinsi lain yang karakteristik LNPRT-nya mirip.

- Populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

Populasi LNPRT menurut jenis lembaga dapat diperoleh dari Kesbanglinmas setempat, Dinas Pemuda dan Olahraga, Departemen agama dan kantor lain yang mempunyai informasi mengenai jumlah organisasi di wilayahnya. Untuk propinsi yang terkena sampel SKLNP dapat menggunakan data hasil *updating* direktori LNPRT.

Dengan asumsi tidak ada kegiatan ekonomis produktif yang dilakukan lembaga, maka nilai PKLNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan lembaga dalam rangka melakukan kegiatan layanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi (antara¹) ditambah biaya primer (upah & gaji pegawai, penyusutan barang modal, dan pajak tak langsung). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang/jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). Jika lembaga menggunakan *input* yang diperoleh secara cuma-cuma dari pihak lain, maka nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku.

Estimasi PKLNPRT dapat dilakukan dengan menggunakan metode langsung. Metode ini didasarkan pada data hasil survei khusus lembaga nonprofit rumah tangga (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata PKLNPRT menurut kode lembaga dan input

Nilai rata-rata ini diperoleh dari SKLNP yang dilaksanakan setiap tahun, namun sampel survei tidak meliputi seluruh propinsi di Indonesia. Sehingga untuk propinsi yang tidak terpilih sebagai sampel pada tahun tertentu maka dapat digunakan pendekatan dengan cara menggunakan data SKLNP propinsi lain yang karakteristik LNPRT-nya mirip dengan propinsi tersebut. Rumus rata-rata per lembaga menurut jenis pengeluaran dari hasil survei:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata PKLNPRT menurut kode lembaga dan input

x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut kode lembaga dan input

¹ Pengeluaran antara LNPRT ini diperlakukan sebagai konsumsi akhir

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut kode lembaga

i : Kode lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Input LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Estimasi PKLNPRT

Setelah mendapatkan nilai rata-rata PKLNPRT menurut kode lembaga dan input dari hasil survei dan populasi LNPRT menurut kode lembaga di propinsi masing-masing, maka estimasi PKLNPRT dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT *adhb*

N_i : Populasi LNPRT menurut kode lembaga

Untuk mendapatkan angka PKLNPRT atas dasar harga konstan (adhk) maka PKLNPRT dihitung dengan cara menjumlahkan PKLNPRT triwulanan adhk, rumusnya adalah:

$$Y = Y_{Q1} + Y_{Q2} + Y_{Q3} + Y_{Q4}$$

Y : PKLNPRT tahunan adhk

Y_{Q1} : PKLNPRT adhk triwulan I

Y_{Q2} : PKLNPRT adhk triwulan II

Y_{Q3} : PKLNPRT adhk triwulan III

Y_{Q4} : PKLNPRT adhk triwulan IV

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)

A. Ruang Lingkup

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan

pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) provinsi mencakup:

- PK-Pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi;
- PK-Pemerintah provinsi yang bersangkutan;
- PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi;
- PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

B. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)

Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PK-P provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari

Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

A. Ruang Lingkup

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar, aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang

- dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
 3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

B. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan*.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB *adh Berlaku*. Untuk memperoleh nilai *adh Konstan* adalah dengan *men-deflate* PMTB (*adh Berlaku*) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB *adh Konstan* dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB *adh Konstan* terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB *adh Berlaku*, nilai PMTB *adh Konstan* tersebut di "*reflate*" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB *adh Konstan* di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB *adh Berlaku* diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB *adh Konstan* adalah dengan cara *men-deflate* PMTB *adh Berlaku* dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 Perubahan Inventori

A. Ruang Lingkup

Inventori merupakan persediaan barang (bahan baku, barang jadi dan barang setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara

nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Dalam konteks mikro (perusahaan), transaksi inventori menjelaskan informasi tentang posisi cadangan atau persediaan barang jadi maupun barang dalam pengerjaan (setengah jadi) perusahaan pada satu saat, yang datanya disajikan dalam laporan neraca akhir tahun, selain itu di dalamnya termasuk juga barang dagangan dan barang dalam perjalanan. Dalam laporan tersebut inventori dicatat sebagai bagian dari harta lancar (*current asset*) pada sisi kiri neraca yang merupakan bagian dari aset/kekayaan perusahaan. Lazimnya data tersebut disajikan secara agregat (tidak dirinci menurut jenis inventori) bersama-sama dengan komponen harta lancar lainnya, di dalamnya termasuk juga nilai penyisihan atas inventori yang rusak atau usang. Selain produsen (*inventory holder*) penguasa inventori lainnya adalah sektor perdagangan, pemerintah dan rumah tangga. Masing-masing pelaku ekonomi tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda dalam melakukan penimbunan barang-barang inventori.

Bagi produsen, keberadaan inventori ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan kegiatan proses produksinya, sehingga diperlukan pencadangan baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Alasan lain karena ketidakpastian pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik); komoditas tersebut diantaranya meliputi komoditas beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Secara makro, di dalam statistik neraca nasional inventori dicakup sebagai bagian dari pembentukan modal atau dikenal sebagai investasi fisik di satu wilayah. Tepatnya inventori tersebut menjelaskan tentang porsi dari investasi yang telah direalisasikan dalam bentuk barang jadi maupun setengah jadi pada berbagai kegiatan ekonomi produksi. Karena nyatanya sebagian dari investasi tersebut memang direalisasikan untuk

pengadaan berbagai keperluan bahan baku maupun bahan penolong/pembantu. Dengan demikian maka tersedianya data tentang inventori akan menjadi informasi yang cukup penting bagi analisis investasi khususnya bagi komponen pembentukan modal, meskipun kontribusinya dalam perekonomian tidaklah terlalu besar.

Pada prinsipnya inventori merupakan persediaan bahan baku barang setengah jadi maupun barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi produksi maupun konsumsi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara atau konsumsi akhir. Data tentang jenis-jenis inventori yang dikuasai oleh perusahaan dicatat secara terpisah pada bagian yang berbeda. Klasifikasi inventori menurut jenis barang dapat dibedakan atas:

- a. Inventori menurut sektor penghasilnya seperti produk atau hasil dari: perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi/bangunan;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan yang diperoleh untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproses tapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang-barang oleh unit perdagangan untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Stok pada pemerintah yang mencakup barang-barang strategis, seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

B. Metode Penghitungan

Metodologi yang dapat digunakan dalam menghitung perubahan inventori ini adalah dengan menggunakan 2 (dua) model pendekatan yakni dari sisi “korporasi” atau unit usaha sebagai pendekatan “langsung” dan dari sisi “komoditas” sebagai pendekatan tidak langsung. Dilihat dari sisi manfaatnya pendekatan secara langsung akan menghasilkan data yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data tentang posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan. Proses penghitungan dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Pendekatan Langsung

Dengan pendekatan langsung memungkinkan untuk diperoleh nilai posisi inventori pada waktu-waktu tertentu (biasanya akhir tahun). Sumber data utama yang dapat digunakan adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku maka diperlukan data inventori pada tahun-tahun yang berurutan. Langkah-langkah penghitungan perubahan inventori dari laporan keuangan, yaitu:

- menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan dengan mendeflate stok awal dan akhir persediaan dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangkan posisi inventori tahun berjalan dengan tahun sebelumnya;
- menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan menginflate perubahan inventori harga konstan dengan data IHPB rata-rata tahun.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung atau yang sering kali disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang dibutuhkan adalah data tentang volume dan harga dari masing-masing barang inventori.

Nilai inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal barang inventori dikalikan rata-rata harga pembelian, atau rata-rata harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan inventori harga konstan dihitung dengan mendeflate nilai perubahan inventori atas dasar

harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai, atau mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah dalam perhitungan Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah yang dalam bentuk posisi pada satu saat dalam waktu yang berurutan;
- Tidak semua komoditas inventori mempunyai data volume dan harga;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume biasanya tidak selalu disertai dengan data harganya. Karena data harga inventori tidak tersedia maka diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDB yang sesuai;
- Diperlukan adanya pelengkap (*mark-up*) untuk melengkapi estimasi bagi sektor-sektor yang datanya tidak tersedia; dan
- Disarankan untuk tingkat kabupaten/kota menggunakan pendekatan langsung dalam menghitung perubahan inventori.

2.6 Ekspor Impor Luar Negeri

A. Ruang Lingkup

Dalam SNA 1993, transaksi ekspor-impor barang luar negeri dalam komponen PDRB Penggunaan Provinsi merupakan salah satu bentuk transaksi internasional antara pelaku ekonomi yang merupakan residen suatu wilayah provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*). Transaksi **ekspor barang** didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*). Sebaliknya, **import barang** didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*) terhadap residen suatu wilayah provinsi.

Secara ringkas, transaksi ekspor-impor barang ke/dari luar negeri dalam komponen PDRB Penggunaan Provinsi mencakup beberapa komponen berikut, yaitu:

- a. Ekspor-impor berdasarkan dokumen kepabeanan (*General merchandise-International Merchandise Trade Statistics/IMTS*) yang telah dinilai dalam *free on board* (fob).

Transaksi ekspor-impor barang tersebut dapat diklasifikasikan menurut kelompok komoditas *Harmonized System (HS)*, *Standard International Trade Classification (SITC)*. Transaksi ekspor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sedangkan impor barang berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanpa mencakup Wilayah Kawasan Berikat Nasional (KBN).

- Pencatatan dokumen PEB (data ekspor) sudah dalam fob, sedangkan pencatatan dokumen PIB (data impor) masih dalam cif (*cost insurance & freight*). Idealnya menurut SNA 93 data impor harus dinyatakan dalam fob juga, sehingga dalam penyusunan PDRB, nilai asuransi dan biaya angkut barang impor dari batas negara asal ke negara tujuan harus dikeluarkan. Namun untuk diketahui bahwa karena kendala data, pada lembar kerja PDB nasional saat ini, komponen biaya angkut impor tersebut masih belum bisa dikeluarkan dari komponen impor.
 - Catatan: Komponen ekspor-impor IMTS (dokumen kepabeanan) juga mencakup sebagian ekspor-impor emas nonmoneter yang juga memiliki dokumen kepabeanan. Sedangkan yang belum tergabung dalam ekspor-impor IMTS, diasumsikan tergabung dalam komponen pembelian langsung (*direct purchase*).
- b. Pembelian Langsung (*Direct Purchase*), mencakup pembelian barang oleh wisatawan manca negara (wisman) selama berkunjung ke wilayah provinsi yang dicatat sebagai *direct purchase exports*, serta pembelian barang oleh penduduk provinsi selama berkunjung ke luar negeri yang dicatat sebagai *direct purchase imports*. Pembelian barang tersebut mencakup baik yang dikonsumsi sendiri selama perjalanan, atau di tempat lain, ataupun dibawa ke negaranya.
- c. Transaksi ilegal & penyelundupan serta transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transactions*) lainnya, diantaranya:
- Barang-barang untuk diolah lebih lanjut (*goods for processing*), yakni barang yang sementara dikirimkan untuk diproses lebih lanjut tanpa adanya perpindahan kepemilikan dan secara signifikan mengalami perubahan bentuk. Tidak termasuk barang yang dikirim untuk *minor processing* (seperti pengepakan, penyimpanan, dan sejenisnya), perawatan (*maintenance*), *servicing*, atau perbaikan rutin. Barang yang dikirim ke luar negeri dicatat sebagai ekspor meskipun tidak dijual ke nonresiden, sedangkan barang yang diterima kembali dicatat sebagai impor meskipun tidak dibeli dari nonresiden.

- Perbaikan barang (*repair on goods*), yakni jasa perbaikan besar (*extensive repair*), renovasi, ataupun penyelarasan (*refitting*) atas *fixed asset* yang dikirimkan ke luar negeri, tanpa ada perpindahan kepemilikan. Jasa perbaikan rutin tidak dicatat dalam rincian ini, namun dicatat dalam rincian jasa.

B. Metode Penghitungan

Secara umum, penghitungan ekspor-impor barang luar negeri dalam PDRB Provinsi identik dengan penghitungan pada lembar kerja ekspor-impor dalam PDB. Namun, langkah awal yang harus dilakukan dalam penghitungan ekspor-impor PDRB provinsi adalah rekonsiliasi sumber data utama ekspor-impor kepabeanan bersama provinsi lainnya di bawah koordinasi Bidang Neraca dan Distribusi BPS Provinsi. Dari rekonsiliasi tersebut diharapkan diperoleh nilai bulanan ekspor (fob) dan impor (cif) dalam USD menurut provinsi asal (ekspor) dan provinsi tujuan (impor). Khusus impor, tidak mencakup data dari Kawasan Berikat Nasional (KBN).

Selanjutnya, dilakukan agregasi data kepabeanan ke dalam klasifikasi 18 kelompok komoditas barang Tabel *Supply & Use /SUT* (triwulanan) menggunakan tabel konversi HS ke Tabel SUT. Untuk melengkapi cakupan, nilai ekspor-impor perlu ditambahkan besaran *Direct Purchase* dan rasio *undocumented transactions* berdasarkan rasio yang telah disepakati. Khusus untuk impor perlu dikurangkan besaran *insurance imports* berdasarkan rasio yang juga telah ditentukan. Dengan demikian, telah diperoleh nilai ekspor-impor triwulanan atas dasar harga berlaku dalam satuan USD yang telah sesuai dengan cakupan PDRB. Untuk mendapatkan nilai ekspor-impor triwulanan atas dasar harga berlaku dalam satuan rupiah, dapat digunakan kurs tertimbang triwulan ekspor-impor.

Penghitungan ekspor-impor barang luar negeri atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000, menggunakan pendekatan deflator. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga per Unit (2000=100) yang digerakkan dengan laju "IHPB tertimbang Ekspor-Impor (2000=100)" per kelompok komoditas barang dalam Tabel SUT. Dengan men-*deflate* (membagi nilai triwulanan ekspor-impor adhb (dalam rupiah) terhadap setiap deflatornya, maka diperoleh nilai triwulanan ekspor-impor atas dasar harga konstan 2000 (dalam rupiah) menurut kelompok komoditas barang dalam Tabel SUT.

2.7 Ekspor Impor antar Provinsi

A. Ruang Lingkup

Menurut sejarah, kegiatan ekspor-impor antar provinsi di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Produksi barang dan jasa antar wilayah yang saling melengkapi menjadi faktor utama kegiatan transaksi ini. Kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi seluruhnya di suatu wilayah perekonomian akan diisi oleh barang dan jasa yang diproduksi di wilayah perekonomian yang lain. Pada sisi yang lain, perekonomian yang memproduksi barang dan jasa yang melebihi kebutuhannya juga terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayahnya.

Dengan semakin berkembangnya zaman membuat produksi dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa menjadi semakin meningkat. Perkembangan yang terjadi pada sarana transportasi dan komunikasi telah semakin memungkinkan distribusi barang dan jasa menjadi semakin lancar. Kondisi tersebut mendorong aktifitas ekspor-impor barang dan jasa antara provinsi menjadi semakin berkembang.

Dibandingkan dengan transaksi ekspor-impor luar negeri, terdapat beberapa faktor yang membuat transaksi ekspor-impor antar provinsi menjadi lebih mudah dilaksanakan, yaitu:

- jarak antar wilayah ekonomi yang relatif dekat;
- faktor selera masyarakat yang relatif sama;
- kondisi spesifik suatu daerah yang membuat residen dari luar wilayah ekonomi tertarik untuk menggunakan barang dan jasa yang diproduksi, seperti daerah wisata, kota pelajar, dll;
- transaksi ekspor dan impor antar provinsi tidak mengenal perizinan tertentu dan tidak dikenai tarif impor ataupun pajak ekspor.

Karenanya tidak mengherankan bila ekspor-impor antar provinsi memiliki peran yang sangat besar dalam PDRB provinsi menurut penggunaan dibandingkan komponen-komponen lain.

Cakupan transaksi ekspor-impor barang dan jasa antar provinsi juga sama dengan cakupan transaksi ekspor-impor luar negeri, yang membedakan hanyalah mitra transaksinya. Dalam ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, yang menjadi mitra

adalah pelaku ekonomi yang merupakan residen luar negeri, sedangkan dalam ekspor-impor antar provinsi yang menjadi mitra adalah pelaku ekonomi yang merupakan residen provinsi lain di Indonesia.

B. Metode Penghitungan

Penghitungan ekspor-impor barang dan jasa antar provinsi dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu memanfaatkan sifat keseimbangan antara permintaan (demand) dan penyediaan (supply) komoditas barang dan jasa di setiap pasar. Metode tersebut adalah kombinasi antara commodity balance dan cross hauling. Kombinasi kedua metode tersebut akan menghasilkan nilai ekspor-impor barang dan jasa yang terjadi di suatu provinsi. Nilai ekspor-impor barang dan jasa antar provinsi diperoleh dengan cara mengurangi hasil penghitungan kombinasi kedua metode tersebut dengan hasil penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BERDASARKAN PDRB PENGGUNAAN

2012 - 2016

<https://sultra.bps.go.id>

3.1 Tinjauan Agregat PDRB menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016 (Juta Rp)

Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	32.397.970,95	36.489.259,48	40.339.623,11	44.092.255,44	48.084.552,74
2. Konsumsi LNPR	726.319,95	758.967,94	869.532,78	886.039,27	970.999,47
3. Konsumsi Pemerintah	10.036.522,54	10.897.203,38	11.717.190,11	12.715.283,67	13.647.774,86
4. PMTB	23.518.165,68	25.473.913,52	31.296.240,66	33.960.623,61	37.498.198,26
5. Perubahan Inventori	1.025.628,58	292.422,70	675.322,44	417.730,56	224.732,51
6. Ekspor	18.076.711,81	20.311.790,19	15.854.394,96	11.980.217,04	11.442.371,25
7. Impor	21.087.334,95	23.182.303,60	22.130.152,58	16.286.174,49	14.885.669,58
Total PDRB	64.693.984,56	71.041.253,61	78.622.151,49	87.765.975,09	96.982.959,52

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB atas dasar harga (adh) berlaku Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2012 s.d. 2016 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Selain adh Berlaku, PDRB menurut Penggunaan juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen Penggunaan adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012 – 2016
(Juta Rp)**

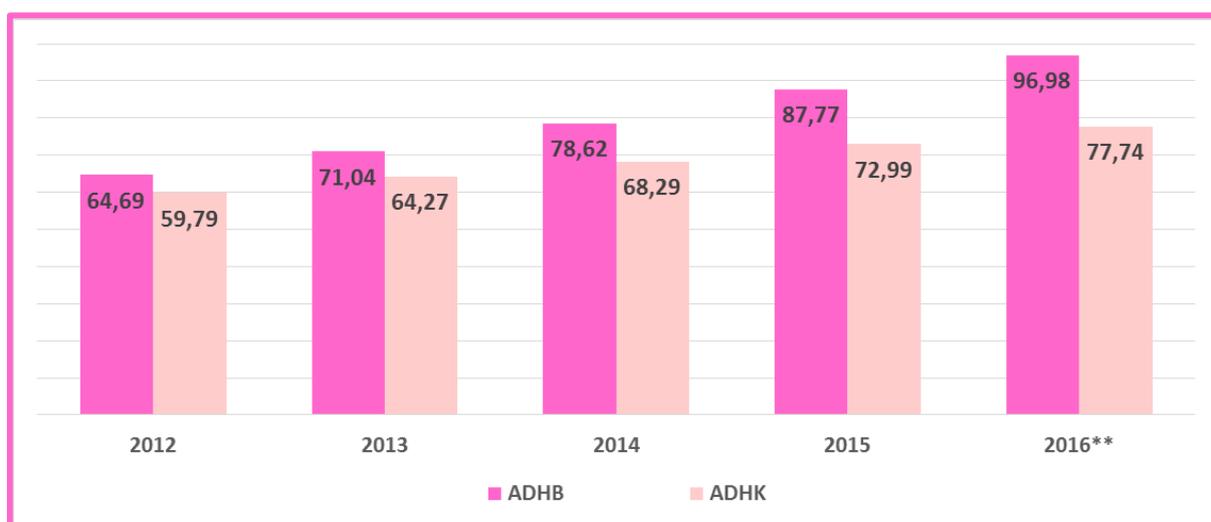
Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	29.249.934,27	31.231.700,39	33.220.138,03	34.916.641,25	37.058.444,05
2. Konsumsi LNPRT	686.646,78	699.244,16	781.871,01	762.377,31	796.486,96
3. Konsumsi Pemerintah	9.452.346,89	10.072.814,36	10.313.592,61	10.773.074,99	10.991.613,28
4. PMTB	23.366.565,63	24.807.787,34	28.742.490,50	29.967.178,93	32.249.871,61
5. Perubahan Inventori	876.216,48	200.914,80	496.888,54	328.309,75	387.747,77
6. Ekspor	18.720.095,58	19.229.505,89	14.910.239,20	7.893.788,75	7.085.758,30
7. Impor	22.566.406,58	21.973.252,64	20.173.435,37	11.650.043,05	10.830.376,41
Total PDRB	59.785.399,06	64.268.714,31	68.291.784,52	72.991.327,94	77.739.545,56

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selama kurun waktu 2012 s.d. 2016, gambaran tentang perkembangan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan PDRB *adhk* dapat dilihat pada tabel 2 di atas. Sama halnya dengan PDRB *adh* Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB *adhk* juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

**Gambar 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010
Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012 – 2016
(Triliun Rp)**



Dari gambar di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB *adhb* selalu lebih besar dari nilai PDRB *adhk*. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB *adhb*. Dalam PDRB *adhk* pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016 (Persen)

Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	50,08	51,36	51,31	50,24	49,58
2. Konsumsi LNPRT	1,12	1,07	1,11	1,01	1,00
3. Konsumsi Pemerintah	15,51	15,34	14,90	14,49	14,07
4. PMTB	36,35	35,86	39,81	38,69	38,66
5. Perubahan Inventori	1,59	0,41	0,86	0,48	0,23
6. Ekspor	27,95	28,59	20,17	13,65	11,80
7. Impor	32,60	32,63	28,15	18,56	15,35
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2012 s.d. 2016, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 35 s.d. 40 persen. Di sisi lain, ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 11 s.d. 29 persen produk Provinsi Sulawesi Tenggara mampu menembus pasar nasional maupun internasional; demikian halnya impor masih mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 15 s.d. 33 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 14 s.d. 16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012 – 2016
(Persen)**

Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7,47	6,78	6,37	5,11	6,13
2. Konsumsi LNPRT	2,32	1,83	11,82	(2,49)	4,47
3. Konsumsi Pemerintah	1,36	6,56	2,39	4,46	2,03
4. PMTB	4,70	6,17	15,86	4,26	7,62
5. Perubahan Inventori	(286,89)	(77,07)	147,31	(33,93)	18,10
6. Ekspor	21,70	2,72	(22,46)	(47,06)	(10,24)
7. Impor	7,98	(2,63)	(8,19)	(42,25)	(7,04)
Total PDRB	11,65	7,50	6,26	6,88	6,51

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2012 s.d. 2016 secara rata-rata mencapai 7,76 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 11,65 persen (2012); 7,50 persen (2013); 6,26 persen (2014); 6,88 persen (2015); dan 6,51 persen (2016). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 11,65 persen, sebaliknya pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 6,26 persen.

Sementara itu, indeks implisit PDRB pada tabel 5 menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB
menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012–2016
(Persen)**

Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	110,76	116,83	121,43	126,28	129,75
2. Konsumsi LNPRT	105,78	108,54	111,21	116,22	121,91
3. Konsumsi Pemerintah	106,18	108,18	113,61	118,03	124,17
4. PMTB	100,65	102,69	108,88	113,33	116,27
5. Perubahan Inventori	117,05	145,55	135,91	127,24	57,96
6. Ekspor	96,56	105,63	106,33	151,77	161,48
7. Impor	93,45	105,50	109,70	139,79	137,44
Total PDRB	108,21	110,54	115,13	120,24	124,75

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut Penggunaan. Data yang ada menunjukkan hal tersebut, di mana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2012 s.d. 2016 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (*adhb*) maupun riil (*adhk*), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2012 s.d. 2016 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 51,36 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 49,58 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis

barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Tenggara 2012–2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total konsumsi rumah tangga (Juta Rp)					
a. ADHB	32.397.970,95	36.489.259,48	40.339.623,11	44.092.255,44	48.084.552,74
b. ADHK	29.249.934,27	31.231.700,39	33.220.138,03	34.916.641,25	37.058.444,05
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	50,08	51,36	51,31	50,24	49,58
Rata-rata konsumsi per-rumah tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	61.386,07	67.642,85	73.198,37	78.381,08	83.744,59
b. ADHK	55.421,32	57.896,52	60.279,69	62.069,95	64.541,40
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	13.813,00	15.224,73	16.478,06	17.640,15	18.849,22
b. ADHK	12.470,82	13.031,07	13.569,87	13.969,23	14.526,97
Pertumbuhan (%)					
a. Total konsumsi RT	7,47	6,78	6,37	5,11	6,13
b. Per-RT	5,10	4,47	4,12	2,97	3,98
c. Perkapita	5,13	4,49	4,13	2,94	3,99
Jumlah RT	527.774	539.440	551.100	562.537	574.181
Jumlah penduduk (Ribu)	2.345,47	2.396,71	2.448,08	2.499,54	2.551,01

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adhb* maupun *adhk* 2010. Pada tahun 2012, secara umum setiap rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara menghabiskan dana sekitar 61.386,07 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 67.642,85 ribu rupiah (2013); 73.198,37 ribu rupiah (2014); 78.381,08 ribu rupiah (2015); dan menjadi 83.744,59 ribu rupiah (2016).

Sementara itu, pada perkiraan *adhk* 2010, rata-rata total konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 5-8 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 7,47 persen. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita mengalami perlambatan, baik *adhb* maupun *adhk* 2010. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 2-6 persen. Pada tahun 2016, daya beli masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat dibandingkan tahun 2015.

**Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016
(Persen)**

Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	48,39	48,76	48,87	48,91	49,37
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,10	3,05	3,07	3,15	3,19
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,68	12,51	12,49	12,09	12,05
d. Kesehatan dan Pendidikan	9,16	8,88	8,79	8,57	8,61
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	17,86	18,05	18,14	18,73	18,41
f. Hotel dan Restoran	2,52	2,47	2,48	2,55	2,57
g. Lainnya	6,29	6,28	6,16	6,00	5,80
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara total, pada tabel 6 terlihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adhk* sebesar 7,47 persen pada tahun 2012. Kemudian, pada empat tahun berikutnya berturut-turut sebesar 6,78 persen (2013), dan 6,37 persen (2014), 5,11 persen (2015), dan 6,13 persen pada tahun 2016. Sementara itu, konsumsi per-kapita dari 5,13 persen ditahun 2012 menjadi sebesar 4,49 persen di tahun 2013 kemudian melambat 4,13 persen pada tahun 2014; 2,94 persen pada tahun 2015; dan 3,99 persen pada tahun 2016. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berkisar 2 persen.

Secara rata-rata dari tahun 2012 s.d. 2016, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 48,39 persen (2012); 48,76 persen (2013); 48,87 persen (2014); 48,91 persen (2015); dan 49,37 persen (2016).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut diantaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan lain sebagainya.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016
(Persen)

Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,67	6,42	5,88	3,90	5,75
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,46	6,37	7,74	8,82	6,42
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,10	4,83	7,70	2,74	7,71
d. Kesehatan dan Pendidikan	9,65	8,03	6,09	4,01	6,17
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,87	8,20	7,01	9,49	7,04
f. Hotel dan Restoran	8,28	6,18	7,20	9,61	6,23
g. Lainnya	8,35	7,72	4,87	3,21	2,69

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman, dan rokok menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 7,67 persen (2012); 6,42 persen (2013); 5,88 (2014); 3,90 persen (2015); dan 5,75 persen

(2016). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Tenggara 2012–2016
(Persen)

Komponen Penggunaan	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,26	6,66	4,65	5,27	4,10
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,44	4,20	3,47	2,83	3,85
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,11	5,88	2,59	2,94	0,91
d. Kesehatan dan Pendidikan	7,84	1,05	3,10	2,55	3,13
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,03	5,19	3,81	3,04	0,15
f. Hotel dan Restoran	3,51	4,15	3,61	2,57	3,45
g. Lainnya	6,28	4,47	3,18	3,40	2,62

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga (pertumbuhan implisit) disajikan dalam tabel 9 yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga (inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2012, namun pada tahun-tahun berikutnya peningkatan harga relatif stabil. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 9,26 persen (2012); 6,66 persen (2013); 4,65 persen (2014); 5,27 persen (2015); dan 4,10 persen (2016). Sementara itu, konsumsi pakaian dan alas kaki sebesar 2,44 persen (2012); 4,20 persen (2013); 3,47 persen (2014); 2,83 persen (2015); dan 3,85 persen (2016).

3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut Penggunaan sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan

bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut yang dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (Juta Rp)					
a. ADHB	726.319,95	758.967,94	869.532,78	886.039,27	970.999,47
b. ADHK	686.646,78	699.244,16	781.871,01	762.377,31	796.486,96
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,12	1,07	1,11	1,01	1,00

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Proporsi pengeluaran LNPRT terhadap PDRB tidak terlalu berfluktuasi (masih di kisaran 1 persen) tercatat 1,12 persen (2012); 1,07 persen (2013); 1,11 persen (2014); 1,01 persen (2015); dan 1,00 persen (2016).

3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk *adhb* maupun *adhk*. Pada tahun 2012, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah *adhb* tercatat sebesar 10.036.522,54 juta rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2016 nilainya mencapai 13.647.774,86 juta rupiah (tabel 11). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah *adhk* 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa secara proporsi, pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB terus mengalami penurunan, dari 15,51 persen di tahun 2012 menjadi 14,07 persen di tahun 2016. Penurunan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (Juta Rp)					
a. ADHB	10.036.522,54	10.897.203,38	11.717.190,11	12.715.283,67	13.647.774,86
b. ADHK	9.452.346,89	10.072.814,36	10.313.592,61	10.773.074,99	10.991.613,28
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	15,51	15,34	14,90	14,49	14,07
konsumsi pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	4.279.118,44	4.546.728,53	4.786.275,50	5.087.049,49	5.349.949,57
b. ADHK	4.030.052,42	4.202.762,02	4.212.929,48	4.310.023,04	4.308.729,99
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi pemerintah	1,36	6,56	2,39	4,46	2,03
b. ADHK	(0,84)	4,29	0,24	2,30	(0,03)
Jumlah penduduk (Ribu)	2.345,47	2.396,71	2.448,08	2.499,54	2.551,01

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2012, konsumsi pemerintah perkapita *adhb* sebesar 4.279.118,44 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah perkapita *adhk* (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2016 (lihat tabel 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Dilihat dari segi nilai, peningkatan konsumsi pemerintah perkapita cenderung berfluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhannya berfluktuatif yaitu sebesar 1,36 persen (2012); 6,56 persen (2013); 2,39 persen (2014); 4,46 persen (2015); dan 2,03 persen (2016).

Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2106**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah					
a. Konsumsi Kolektif	5.946.247,45	6.594.558,46	7.071.210,68	7.692.083,31	8.255.921,04
%	59,25	60,52	60,35	60,49	60,49
b. Konsumsi Individu	4.090.275,08	4.302.644,92	4.645.979,43	5.023.200,36	5.391.853,82
%	40,75	39,48	39,65	39,51	39,51
Total Konsumsi	10.036.522,54	10.897.203,38	11.717.190,11	12.715.283,67	13.647.774,86
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan Riil					
a. Konsumsi Kolektif	0,75	8,73	1,26	4,74	1,92
b. Konsumsi Individu	2,24	3,50	4,07	4,05	2,18
Total Konsumsi	1,36	6,56	2,39	4,46	2,03
Pertumbuhan indeks harga (%) implisit					
a. Konsumsi Kolektif	3,04	2,00	5,89	3,86	5,31
b. Konsumsi Individu	1,13	1,63	3,76	3,91	5,05
c. Total Konsumsi	2,25	1,89	5,01	3,89	5,20

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 tercatat tumbuh 6,56 persen, dengan rincian untuk total konsumsi kolektif dan individu tercatat masing-masing sebesar 8,73 persen dan 3,50 persen (tabel 12).

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Sekitar 60 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 12). Begitu pula dengan proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah mengalami peningkatan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2012 proporsinya mencapai 59,25 persen dan hingga tahun 2016 mencapai 60,49 persen.

Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 12). Secara umum, proporsi konsumsi individu pada periode 2012-2016 cenderung menurun. Hanya pada tahun 2014 saja proporsinya meningkat menjadi 39,65 persen.

3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut Penggunaan, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data yang ada menunjukkan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2012 - 2016 berfluktuasi dari 4,70 persen (2012) menjadi 7,62 persen (2016). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung meningkat tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen non bangunan.

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Sulawesi Tenggara 2012–2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB	23.518.165,68	25.473.913,52	31.296.240,66	33.960.623,61	37.498.198,26
b. ADHK	23.366.565,63	24.807.787,34	28.742.490,50	29.967.178,93	32.249.871,61
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	36,35	35,86	39,81	38,69	38,66
Struktur PMTB					
a. Bangunan	63,59	63,12	62,17	63,98	62,86
b. Non Bangunan	36,41	36,88	37,83	36,02	37,14
Total PMTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan					
a. Bangunan	4,09	5,54	14,28	7,80	6,44
b. Non Bangunan	5,78	7,26	18,58	(1,60)	9,76
c. Total PMTB	4,70	6,17	15,86	4,26	7,62

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2012-2016 (tabel 13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2012 hanya mencapai 4,09 persen dan meningkat di tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar 5,54 persen (2013) dan 14,28 persen (2014), kemudian melambat menjadi 7,80 persen (2015) dan 6,44 persen (2016).

Sementara jika dilihat strukturnya, sub komponen bangunan menunjukkan pola yang sangat variatif antar tahunnya. Dalam periode tahun 2012-2016 proporsi bangunan cenderung melambat, yaitu sebesar 63,59 persen (2012), 63,12 persen (2013), dan 62,17 persen (2014). Kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan hingga mencapai 63,98 persen, dan kembali melambat pada tahun 2016 sebesar 62,86 persen. Sedangkan proporsi non bangunan terhadap total PMTB cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar 36,41 persen (2012); 36,88 persen (2013); 37,83 persen (2014), dan mengalami penurunan pada tahun 2015 dengan hanya mencapai 36,02 persen, kemudian kembali meningkat di tahun 2016 menjadi 37,14 persen.

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2012-2016 pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai besaran angka 15,86 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar 4,26 persen.

3.6 Perkembangan Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi, ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB	1.025.628,58	292.422,70	675.322,44	417.730,56	224.732,51
b. ADHK	876.216,48	200.914,80	496.888,54	328.309,75	387.747,77
Proporsi terhadap					
PDRB (% ADHB)	1,59	0,41	0,86	0,48	0,23

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2012 perubahan inventori sebesar 1.025.628,58 juta rupiah. Sedangkan tahun 2013 perubahan inventori mengalami penurunan tajam yaitu sebesar 292.422,70 juta rupiah, kemudian pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 675.322,44 juta rupiah. Pada tahun 2015, perubahan inventori mengalami penurunan menjadi 417.730,56 juta rupiah dan pada tahun 2016 tercatat sebesar 224.732,51 juta rupiah.

3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Secara total, nilai ekspor luar negeri tahun 2016 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara *adhb* tercatat sebesar 10.312.951,62 juta rupiah; dan pada tahun 2013 nilai ekspor meningkat mencapai 10.531.944,59 juta rupiah. Tahun 2014 s.d. 2016 ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan. Pada tahun 2014 penurunan yang sangat tajam tercatat sebesar 4.417.625,19 juta rupiah; pada tahun 2015 menjadi 3.393.790,54 juta rupiah, dan terus menurun di tahun 2016 menjadi 3.166.514,39 juta rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor *adhb*, nilai ekspor *adhk* 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 11.524.260,49 juta rupiah (2012); 10.461.632,71 juta rupiah (2013); 4.066.264,00 juta rupiah (2014); 3.214.818,98 juta rupiah (2015); dan 2.942.959,16 juta rupiah (2016). Selama kurun waktu 2012-2016, proporsi ekspor luar negeri dalam PDRB cenderung menurun, yaitu dari 15,94 persen pada tahun 2012 menjadi 3,27 persen di tahun 2016.

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor (<i>Juta Rp</i>)					
a. ADHB	10.312.951,62	10.531.944,59	4.417.625,19	3.393.790,54	3.166.514,39
b. ADHK	11.524.260,49	10.461.632,71	4.066.264,00	3.214.818,98	2.942.959,16
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	15,94	14,83	5,62	3,87	3,27
Struktur Ekspor					
a. Barang	10.137.118,69	10.305.411,44	4.191.930,51	3.142.718,66	2.896.512,85
%	98,30	97,85	94,89	92,60	91,47
b. Jasa	175.832,93	226.533,16	225.694,68	251.071,88	270.001,54
%	1,70	2,15	5,11	7,40	8,53
Pertumbuhan					
a. Barang	26,27	(9,63)	(62,13)	(22,18)	(9,30)
b. Jasa	12,84	19,28	(7,72)	6,16	5,13
c. Total ekspor	26,06	(9,22)	(61,13)	(20,94)	(8,46)

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara berupa barang (lebih dari 90 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Sedangkan pertumbuhan riil total ekspor pada tahun 2012 sebesar 26,06 persen. Pertumbuhan tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang. Sementara itu, pertumbuhan minus terjadi berturut-turut pada tahun 2013 sampai dengan 2016 masing-masing sebesar minus 9,22 persen; minus 61,13 persen; minus 20,94 persen; dan minus 8,46 persen. Pertumbuhan minus tersebut didorong dengan pertumbuhan ekspor barang yang juga menunjukkan pertumbuhan negatif.

3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh

ekonomi domestik Sulawesi Tenggara. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor (<i>Juta Rp</i>)					
a. ADHB	3.170.203,39	7.067.260,68	10.025.302,23	5.798.692,94	5.707.839,27
b. ADHK	2.376.728,92	4.249.725,84	5.795.396,55	4.436.829,59	4.612.064,12
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	4,90	9,95	12,75	6,61	5,89
Struktur Impor					
a. Barang	3.022.743,48	6.867.712,07	9.797.252,49	5.560.581,54	5.466.174,77
%	95,35	97,18	97,73	95,89	95,77
b. Jasa	147.459,91	199.548,61	228.049,74	238.111,40	241.664,49
%	4,65	2,82	2,27	4,11	4,23
Pertumbuhan					
a. Barang	52,04	82,43	37,93	(24,12)	4,08
b. Jasa	16,09	18,85	(3,14)	1,24	0,28
c. Total impor	49,40	78,81	36,37	(23,44)	3,95

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Sulawesi Tenggara di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Sulawesi Tenggara pada periode tahun 2012 s.d. 2016 cenderung meningkat (baik *adhb* maupun *adhk* 2010). Proporsi impor luar negeri pada tahun 2012 sampai dengan 2014 meningkat, yaitu 4,90 persen (2012); 9,95 persen (2013), dan 12,75 persen (2014). Sementara di tahun 2015 s.d. 2016, proporsi impor menurun menjadi 6,61 persen (2015); dan 5,89 persen (2016).

Secara riil nilai impor mengalami perubahan yang berfluktuatif selama periode 2012-2016. Pada tahun 2012 pertumbuhan impor sebesar 49,40 persen dan mengalami peningkatan menjadi 78,81 persen pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 melambat menjadi sebesar 36,37 persen. Pada tahun 2015 impor luar negeri mengalami pertumbuhan negatif yaitu -23,44 persen dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 3,95 persen. Hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan impor barang karena pembentuk impor terbesar adalah impor barang. Sementara impor jasa mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi yang mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 18,85 persen dan pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2014 yaitu -3,14 persen.

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki porsi lebih dari 95 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa. Selama periode 2012-2016, impor LN dalam bentuk barang cenderung mengalami peningkatan. Namun impor LN jasa mempunyai pola struktur yang agak berbeda dengan impor barang, yaitu cenderung mengalami penurunan.

3.9 Perkembangan Net Ekspor antar Provinsi

Net ekspor antar provinsi didefinisikan sebagai ekspor antar provinsi dikurangi impor antar provinsi. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar provinsi tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut.

Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi (dalam series PDRB *adhk* 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut Penggunaan

dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "**positif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Pada bab-bab berikut akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGGUNAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2012 - 2016

<https://sultra.bps.go.id>

4.1 PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi (nilai tambah), pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB Penggunaan dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

**Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Provinsi Sulawesi Tenggara 2012–2016**

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Juta Rp</i>)					
- ADHB	64.693.984,56	71.041.253,61	78.622.151,49	87.765.975,09	96.982.959,52
- ADHK 2010	59.785.399,06	64.268.714,31	68.291.784,52	72.991.327,94	77.739.545,56
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	27.582,58	29.641,12	32.115,83	35.112,85	38.017,48
- ADHK 2010	25.489,79	26.815,36	27.896,05	29.201,90	30.474,03
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK	9,22	5,20	4,03	4,68	4,36
Jumlah penduduk (<i>ribu</i>)	2.345,47	2.396,71	2.448,08	2.499,54	2.551,01
Pertumbuhan	2,23	2,18	2,14	2,10	2,06

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara rata-rata mampu menciptakan PDRB (atau nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4 sampai 9 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 2 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam Pengeluaran PDRB Sulawesi Tenggara menurut Penggunaan (sekitar 50 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun, di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

**Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor
2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	32.397.970,95	36.489.259,48	40.339.623,11	44.092.255,44	48.084.552,74
Total Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	18.076.711,81	20.311.790,19	15.854.394,96	11.980.217,04	11.442.371,25
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,79	1,80	2,54	3,68	4,20

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 1,79 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Seiring dengan peningkatan konsumsi rumah tangga, rasio perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor semakin meningkat tiap tahunnya. Peningkatan dan penurunan rasio ini dapat disebabkan oleh perubahan volume maupun harga.

4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Provinsi Sulawesi Tenggara digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB
2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	32.397.970,95	36.489.259,48	40.339.623,11	44.092.255,44	48.084.552,74
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	23.518.165,68	25.473.913,52	31.296.240,66	33.960.623,61	37.498.198,26
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1,38	1,43	1,29	1,30	1,28

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung berfluktuatif, dengan masing-masing rasio tercatat sebesar 1,38 (2012); 1,43 (2013); 1,29 (2014); 1,30 (2015); dan 1,28 (2016). Hal ini terjadi karena peningkatan nilai investasi yang juga berfluktuatif.

4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 60 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru

semakin mengalami penurunan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

Tabel 20. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara 2012–2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)	43.160.813,44	48.145.430,80	52.926.346,00	57.693.578,38	62.703.327,07
a. Rumah Tangga	32.397.970,95	36.489.259,48	40.339.623,11	44.092.255,44	48.084.552,74
b. LNPRT	726.319,95	758.967,94	869.532,78	886.039,27	970.999,47
c. Pemerintah	10.036.522,54	10.897.203,38	11.717.190,11	12.715.283,67	13.647.774,86
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	64.693.984,56	71.041.253,61	78.622.151,49	87.765.975,09	96.982.959,52
Proporsi (%)	66,72	67,77	67,32	65,74	64,65

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) 2012–2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	18.076.711,81	20.311.790,19	15.854.394,96	11.980.217,04	11.442.371,25
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	23.518.165,68	25.473.913,52	31.296.240,66	33.960.623,61	37.498.198,26
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,77	0,80	0,51	0,35	0,31

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2012 sampai 2016 ekspor mempunyai nilai yang lebih kecil dari PMTB. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Rasio ekspor terhadap PMTB berkisar antara 0,31–0,80 dengan nilai PMTB masing-masing tahun sebesar 23.518.165,68 Juta rupiah (2012); 25.473.913,52 Juta rupiah (2013); 31.296.240,66 Juta rupiah (2014); 33.960.623,61 Juta rupiah (2015); dan 37.498.198,26 Juta rupiah (2016).

4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah atau negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor
Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	64.693.984,56	71.041.253,61	78.622.151,49	87.765.975,09	96.982.959,52
Total Impor (ADHB) (Juta Rp)	21.087.334,95	23.182.303,60	22.130.152,58	16.286.174,49	14.885.669,58
Rasio PDRB terhadap Impor	3,07	3,06	3,55	5,39	6,52

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa rasio PDRB terhadap impor tahun 2012 - 2016 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Rasio PDRB terhadap impor secara berturut-turut sebesar 3,07 (2012); 3,06 (2013); 3,55 (2014); 5,39 (2015); serta 6,52 (2016). Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2016, lebih disebabkan karena peningkatan PDRB, sedangkan nilai impor justru menurun. Hal ini bisa menjadi indikasi yang baik karena peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan PDRB (ADHB) (Juta Rp)	64.693.984,56	71.041.253,61	78.622.151,49	87.765.975,09	96.982.959,52
%	75,42	75,40	78,04	84,35	86,69
Total Nilai Impor (ADHB) (Juta Rp)	21.087.334,95	23.182.303,60	22.130.152,58	16.286.174,49	14.885.669,58
%	24,58	24,60	21,96	15,65	13,31
Total Permintaan Akhir (Juta Rp)	85.781.319,51	94.223.557,21	100.752.304,07	104.052.149,58	111.868.629,09

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri, dengan rentang 13–24 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 75–86 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 85.781.319,51 juta (2012) menjadi sebesar 111.868.629,09 juta rupiah (2016).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 64.693.984,56 juta rupiah (2012); 71.041.253,61 juta rupiah (2013); 78.622.151,49 juta rupiah (2014); 87.765.975,09 juta rupiah (2015); dan 96.982.959,22 juta rupiah (2016). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 21.087.334,95 Juta rupiah (2012); 23.182.303,60 Juta rupiah (2013); 22.130.152,58 Juta rupiah (2014); 16.286.174,49 Juta rupiah (2015); dan 14.885.669,58 Juta rupiah (2016).

4.8 Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga, maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	18.076.711,81	20.311.790,19	15.854.394,96	11.980.217,04	11.442.371,25
Nilai Impor (ADHB) (Juta Rp)	21.087.334,95	23.182.303,60	22.130.152,58	16.286.174,49	14.885.669,58
Net ekspor (X-M) (Juta Rp)	(3.010.623,14)	(2.870.513,41)	(6.275.757,62)	(4.305.957,45)	(3.443.298,33)
Rasio ekspor thdp Impor	0,86	0,88	0,72	0,74	0,77

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selama periode 2012 - 2016, posisi perdagangan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Tenggara selalu dalam posisi defisit. Nilai impor yang lebih besar dari ekspor menyebabkan adanya aliran

devisa keluar. Defisit perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terjadi antara tahun 2012 sampai dengan 2016 tercatat masing-masing sebesar -3.010.623,14 Juta rupiah (2012); -2.870.513,41 Juta rupiah (2013); -6.275.757,62 Juta rupiah (2014); -4.305.957,45 Juta rupiah (2015); dan -3.443.298,33 Juta rupiah (2016).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 rasionya sebesar 0,86 menjadi sekitar 0,88 pada tahun 2013, kemudian 0,72 pada tahun 2014; 0,74 pada tahun 2015; dan 0,77 pada tahun 2016.

4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d. +1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional, Provinsi Sulawesi Tenggara 2012–2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN (ADHB) (Juta Rp)	10.312.951,62	10.531.944,59	4.417.625,19	3.393.790,54	3.166.514,39
Nilai Impor LN (ADHB) (Juta Rp)	3.170.203,39	7.067.260,68	10.025.302,23	5.798.692,94	5.707.839,27
(X - M) (Juta Rp)	7.142.748,23	3.464.683,91	(5.607.677,04)	(2.404.902,40)	(2.541.324,88)
(X + M) (Juta Rp)	13.483.155,01	17.599.205,27	14.442.927,42	9.192.483,48	8.874.353,66
RPI	0,53	0,20	(0,39)	(0,26)	(0,29)

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2012-2013, posisi ekspor luar negeri selalu lebih tinggi dari impor. Namun sejak tahun 2014 hingga 2016 posisi ekspor lebih rendah dari impor. Kecenderungan nilai ekspor pada periode 2012

hingga 2013 terus meningkat dari 10.312.951,62 Juta rupiah pada tahun 2012 menjadi 10.531.944,59 Juta rupiah pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 menurun tajam menjadi 4.417.625,19 Juta rupiah kemudian menurun lagi hingga tahun 2016 menjadi 3.166.514,39 Juta rupiah. Sedangkan nilai impor mengalami peningkatan pada tahun 2012 hingga 2014, kemudian menurun di tahun 2015 hingga 2016.

Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2012-2013 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, ditandai dengan nilai rasio yang selalu positif. Sedangkan pada tahun 2014-2016 rasio perdagangan internasionalnya didominasi oleh impor karena rasio yang menunjukkan tanda minus.

4.10 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 26. Incremental Capital Output Ratio,
Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK) (Juta Rp)	59.785.399,06	64.268.714,31	68.291.784,52	72.991.327,94	77.739.545,56
Perubahan (Juta Rp)	6.238.709,53	4.483.315,25	4.023.070,21	4.699.543,42	4.748.217,62
PMTB (ADHK) (Juta Rp)	23.366.565,63	24.807.787,34	28.742.490,50	29.967.178,93	32.249.871,61
ICOR	3,75	5,53	7,14	6,38	6,79

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR yang berfluktuatif dari tahun 2012 s.d. 2016. Dimana besaran nilai ICOR setiap tahunnya tercatat sebesar 3,75 (2012); 5,53 (2013); 7,14 (2014); 6,38 (2015); dan 6,79 (2016).

BAB V

PENUTUP

<https://sultra.bps.go.id>

1. PDRB menurut Penggunaan tahun 2012 s.d. 2016 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB Penggunaan akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB Penggunaan terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB Penggunaan. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2012 s.d. 2016, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut Penggunaan, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<https://sultra.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://sultra.bps.go.id>

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012 - 2016**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	32.397.970,95	36.489.259,48	40.339.623,11	44.092.255,44	48.084.552,74
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	15.676.425,35	17.793.642,89	19.715.905,69	21.564.644,64	23.740.972,75
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1.003.353,82	1.112.124,82	1.239.754,77	1.387.238,80	1.533.090,17
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4.108.856,52	4.560.748,17	5.039.055,57	5.329.597,54	5.792.967,87
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2.969.494,37	3.241.614,97	3.545.459,87	3.781.790,95	4.140.774,18
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5.788.014,20	6.587.701,04	7.317.983,44	8.256.476,97	8.850.692,37
1.f. Hotel dan Restoran	815.107,04	901.421,16	1.001.285,81	1.125.711,81	1.237.073,89
1.g. Lainnya	2.036.719,66	2.292.006,42	2.480.177,95	2.646.794,73	2.788.981,50
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	726.319,95	758.967,94	869.532,78	886.039,27	970.999,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	10.036.522,54	10.897.203,38	11.717.190,11	12.715.283,67	13.647.774,86
3.a. Konsumsi Kolektif	5.946.247,45	6.594.558,46	7.071.210,68	7.692.083,31	8.255.921,04
3.b. Konsumsi Individu	4.090.275,08	4.302.644,92	4.645.979,43	5.023.200,36	5.391.853,82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	23.518.165,68	25.473.913,52	31.296.240,66	33.960.623,61	37.498.198,26
4.a. Bangunan	14.955.362,94	16.078.909,04	19.458.007,07	21.729.420,22	23.571.088,64
4.b. Non-Bangunan	8.562.802,74	9.395.004,48	11.838.233,59	12.231.203,38	13.927.109,62
5. Perubahan Inventori	1.025.628,58	292.422,70	675.322,44	417.730,56	224.732,51
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	10.312.951,62	10.531.944,59	4.417.625,19	3.393.790,54	3.166.514,39
6.a. Barang	10.137.118,69	10.305.411,44	4.191.930,51	3.142.718,66	2.896.512,85
6.b. Jasa	175.832,93	226.533,16	225.694,68	251.071,88	270.001,54
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	3.170.203,39	7.067.260,68	10.025.302,23	5.798.692,94	5.707.839,27
7.a. Barang	3.022.743,48	6.867.712,07	9.797.252,49	5.560.581,54	5.466.174,77
7.b. Jasa	147.459,91	199.548,61	228.049,74	238.111,40	241.664,49
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(10.153.371,37)	(6.335.197,32)	(668.080,57)	(1.901.055,06)	(901.973,45)
8.a. Ekspor	7.763.760,18	9.779.845,60	11.436.769,77	8.586.426,50	8.275.856,86
8.b. Impor	17.917.131,56	16.115.042,92	12.104.850,35	10.487.481,55	9.177.830,31
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	64.693.984,56	71.041.253,61	78.622.151,49	87.765.975,09	96.982.959,52

* Angka Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012 - 2016**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	29.249.934,27	31.231.700,39	33.220.138,03	34.916.641,25	37.058.444,05
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	13.934.831,38	14.829.708,28	15.701.639,11	16.314.656,31	17.253.420,01
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	923.038,17	981.822,41	1.057.791,21	1.151.080,06	1.224.960,15
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.671.686,79	3.849.081,36	4.145.292,72	4.258.996,45	4.587.370,05
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2.597.577,28	2.806.211,36	2.977.034,37	3.096.560,32	3.287.482,00
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5.533.216,00	5.987.079,97	6.406.573,45	7.014.589,20	7.508.418,46
1.f. Hotel dan Restoran	753.827,34	800.410,40	858.076,39	940.542,39	999.097,42
1.g. Lainnya	1.835.757,31	1.977.386,62	2.073.730,77	2.140.216,51	2.197.695,96
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	686.646,78	699.244,16	781.871,01	762.377,31	796.486,96
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	9.452.346,89	10.072.814,36	10.313.592,61	10.773.074,99	10.991.613,28
3.a. Konsumsi Kolektif	5.539.520,53	6.022.957,86	6.098.913,89	6.387.703,59	6.510.502,86
3.b. Konsumsi Individu	3.912.826,36	4.049.856,50	4.214.678,72	4.385.371,40	4.481.110,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	23.366.565,63	24.807.787,34	28.742.490,50	29.967.178,93	32.249.871,61
4.a. Bangunan	14.862.806,46	15.686.637,22	17.926.624,08	19.324.403,67	20.568.281,78
4.b. Non-Bangunan	8.503.759,17	9.121.150,12	10.815.866,42	10.642.775,26	11.681.589,83
5. Perubahan Inventori	876.216,48	200.914,80	496.888,54	328.309,75	387.747,77
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	11.524.260,49	10.461.632,71	4.066.264,00	3.214.818,98	2.942.959,16
6.a. Barang	11.363.072,73	10.269.371,79	3.888.853,02	3.026.486,40	2.744.973,39
6.b. Jasa	161.187,76	192.260,92	177.410,98	188.332,58	197.985,77
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	2.376.728,92	4.249.725,84	5.795.396,55	4.436.829,59	4.612.064,12
7.a. Barang	2.241.315,43	4.088.787,20	5.639.507,21	4.279.015,01	4.453.803,34
7.b. Jasa	135.413,49	160.938,65	155.889,34	157.814,57	158.260,78
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(12.993.842,57)	(8.955.653,62)	(3.534.063,62)	(2.534.243,69)	(2.075.513,16)
8.a. Ekspor	7.195.835,09	8.767.873,18	10.843.975,20	4.678.969,77	4.142.799,13
8.b. Impor	20.189.677,66	17.723.526,79	14.378.038,82	7.213.213,46	6.218.312,29
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	59.785.399,06	64.268.714,31	68.291.784,52	72.991.327,94	77.739.545,56

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012 - 2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	50,08	51,36	51,31	50,24	49,58
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	24,23	25,05	25,08	24,57	24,48
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,55	1,57	1,58	1,58	1,58
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,35	6,42	6,41	6,07	5,97
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,59	4,56	4,51	4,31	4,27
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,95	9,27	9,31	9,41	9,13
1.f. Hotel dan Restoran	1,26	1,27	1,27	1,28	1,28
1.g. Lainnya	3,15	3,23	3,15	3,02	2,88
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,12	1,07	1,11	1,01	1,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	15,51	15,34	14,90	14,49	14,07
3.a. Konsumsi Kolektif	9,19	9,28	8,99	8,76	8,51
3.b. Konsumsi Individu	6,32	6,06	5,91	5,72	5,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	36,35	35,86	39,81	38,69	38,66
4.a. Bangunan	23,12	22,63	24,75	24,76	24,30
4.b. Non-Bangunan	13,24	13,22	15,06	13,94	14,36
5. Perubahan Inventori	1,59	0,41	0,86	0,48	0,23
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	15,94	14,83	5,62	3,87	3,27
6.a. Barang	15,67	14,51	5,33	3,58	2,99
6.b. Jasa	0,27	0,32	0,29	0,29	0,28
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	4,90	9,95	12,75	6,61	5,89
7.a. Barang	4,67	9,67	12,46	6,34	5,64
7.b. Jasa	0,23	0,28	0,29	0,27	0,25
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(15,69)	(8,92)	(0,85)	(2,17)	(0,93)
8.a. Ekspor	12,00	13,77	14,55	9,78	8,53
8.b. Impor	27,70	22,68	15,40	11,95	9,46
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012 - 2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	48,92	48,60	48,64	47,84	47,67
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	23,31	23,07	22,99	22,35	22,19
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,54	1,53	1,55	1,58	1,58
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,14	5,99	6,07	5,83	5,90
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,34	4,37	4,36	4,24	4,23
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	9,26	9,32	9,38	9,61	9,66
1.f. Hotel dan Restoran	1,26	1,25	1,26	1,29	1,29
1.g. Lainnya	3,07	3,08	3,04	2,93	2,83
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,15	1,09	1,14	1,04	1,02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	15,81	15,67	15,10	14,76	14,14
3.a. Konsumsi Kolektif	9,27	9,37	8,93	8,75	8,37
3.b. Konsumsi Individu	6,54	6,30	6,17	6,01	5,76
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	39,08	38,60	42,09	41,06	41,48
4.a. Bangunan	24,86	24,41	26,25	26,47	26,46
4.b. Non-Bangunan	14,22	14,19	15,84	14,58	15,03
5. Perubahan Inventori	1,47	0,31	0,73	0,45	0,50
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	19,28	16,28	5,95	4,40	3,79
6.a. Barang	19,01	15,98	5,69	4,15	3,53
6.b. Jasa	0,27	0,30	0,26	0,26	0,25
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	3,98	6,61	8,49	6,08	5,93
7.a. Barang	3,75	6,36	8,26	5,86	5,73
7.b. Jasa	0,23	0,25	0,23	0,22	0,20
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(21,73)	(13,93)	(5,17)	(3,47)	(2,67)
8.a. Ekspor	12,04	13,64	15,88	6,41	5,33
8.b. Impor	33,77	27,58	21,05	9,88	8,00
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012 - 2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	14,79	12,63	10,55	9,30	9,05
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	17,63	13,51	10,80	9,38	10,09
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	10,08	10,84	11,48	11,90	10,51
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,46	11,00	10,49	5,77	8,69
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	18,25	9,16	9,37	6,67	9,49
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,06	13,82	11,09	12,82	7,20
1.f. Hotel dan Restoran	12,08	10,59	11,08	12,43	9,89
1.g. Lainnya	15,15	12,53	8,21	6,72	5,37
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	3,83	4,49	14,57	1,90	9,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	3,64	8,58	7,52	8,52	7,33
3.a. Konsumsi Kolektif	3,82	10,90	7,23	8,78	7,33
3.b. Konsumsi Individu	3,39	5,19	7,98	8,12	7,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,47	8,32	22,86	8,51	10,42
4.a. Bangunan	3,90	7,51	21,02	11,67	8,48
4.b. Non-Bangunan	5,48	9,72	26,01	3,32	13,87
5. Perubahan Inventori	(300,66)	(71,49)	130,94	(38,14)	(46,20)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	4,80	2,12	(58,05)	(23,18)	(6,70)
6.a. Barang	4,59	1,66	(59,32)	(25,03)	(7,83)
6.b. Jasa	18,75	28,83	(0,37)	11,24	7,54
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	63,27	122,93	41,86	(42,16)	(1,57)
7.a. Barang	65,59	127,20	42,66	(43,24)	(1,70)
7.b. Jasa	26,83	35,32	14,28	4,41	1,49
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(20,36)	(37,60)	(89,45)	184,55	(52,55)
8.a. Ekspor	19,98	25,97	16,94	(24,92)	(3,62)
8.b. Impor	(6,78)	(10,06)	(24,88)	(13,36)	(12,49)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	16,03	9,81	10,67	11,63	10,50

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012 - 2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	7,47	6,78	6,37	5,11	6,13
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,67	6,42	5,88	3,90	5,75
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7,46	6,37	7,74	8,82	6,42
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,10	4,83	7,70	2,74	7,71
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	9,65	8,03	6,09	4,01	6,17
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,87	8,20	7,01	9,49	7,04
1.f. Hotel dan Restoran	8,28	6,18	7,20	9,61	6,23
1.g. Lainnya	8,35	7,72	4,87	3,21	2,69
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,32	1,83	11,82	(2,49)	4,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	1,36	6,56	2,39	4,46	2,03
3.a. Konsumsi Kolektif	0,75	8,73	1,26	4,74	1,92
3.b. Konsumsi Individu	2,24	3,50	4,07	4,05	2,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,70	6,17	15,86	4,26	7,62
4.a. Bangunan	4,09	5,54	14,28	7,80	6,44
4.b. Non-Bangunan	5,78	7,26	18,58	(1,60)	9,76
5. Perubahan Inventori	(286,89)	(77,07)	147,31	(33,93)	18,10
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	26,06	(9,22)	(61,13)	(20,94)	(8,46)
6.a. Barang	26,27	(9,63)	(62,13)	(22,18)	(9,30)
6.b. Jasa	12,84	19,28	(7,72)	6,16	5,13
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	49,40	78,81	36,37	(23,44)	3,95
7.a. Barang	52,04	82,43	37,93	(24,12)	4,08
7.b. Jasa	16,09	18,85	(3,14)	1,24	0,28
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(0,56)	(31,08)	(60,54)	(28,29)	(18,10)
8.a. Ekspor	15,31	21,85	23,68	(56,85)	(11,46)
8.b. Impor	4,57	(12,21)	(18,88)	(49,83)	(13,79)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	11,65	7,50	6,26	6,88	6,51

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012 - 2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	127,36	143,44	158,58	173,33	189,03
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	128,29	145,62	161,35	176,48	194,29
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	121,14	134,27	149,68	167,49	185,09
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	119,51	132,65	146,56	155,01	168,49
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	134,66	147,00	160,78	171,50	187,78
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	123,61	140,68	156,28	176,32	189,01
1.f. Hotel dan Restoran	122,51	135,48	150,49	169,19	185,93
1.g. Lainnya	145,60	163,85	177,30	189,21	199,37
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	113,88	119,00	136,34	138,93	152,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	130,13	141,29	151,92	164,86	176,95
3.a. Konsumsi Kolektif	122,41	135,75	145,57	158,35	169,95
3.b. Konsumsi Individu	143,27	150,71	162,74	175,95	188,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	111,87	121,17	148,86	161,54	178,36
4.a. Bangunan	109,94	118,20	143,04	159,74	173,28
4.b. Non-Bangunan	115,39	126,61	159,53	164,83	187,68
5. Perubahan Inventori	324,69	92,57	213,79	132,24	71,15
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	201,84	206,12	86,46	66,42	61,97
6.a. Barang	201,85	205,21	83,47	62,58	57,68
6.b. Jasa	200,90	258,83	257,87	286,87	308,49
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	3.078,26	6.862,29	9.734,54	5.630,51	5.542,30
7.a. Barang	16.342,68	37.130,79	52.969,56	30.063,69	29.553,27
7.b. Jasa	174,53	236,18	269,91	281,82	286,02
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	86,54	53,99	5,69	16,20	7,69
8.a. Ekspor	132,58	167,01	195,30	146,63	141,33
8.b. Impor	101,87	91,62	68,82	59,63	52,18
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	133,66	146,78	162,44	181,33	200,37

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012 - 2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	114,99	122,78	130,59	137,26	145,68
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	114,04	121,36	128,50	133,51	141,20
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	111,44	118,54	127,71	138,97	147,89
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	106,79	111,95	120,57	123,87	133,42
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	117,79	127,26	135,00	140,42	149,08
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	118,17	127,86	136,82	149,80	160,35
1.f. Hotel dan Restoran	113,30	120,30	128,97	141,36	150,16
1.g. Lainnya	131,23	141,36	148,24	153,00	157,10
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	107,66	109,64	122,59	119,54	124,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	122,56	130,60	133,72	139,68	142,51
3.a. Konsumsi Kolektif	114,04	123,99	125,55	131,50	134,02
3.b. Konsumsi Individu	137,06	141,86	147,63	153,61	156,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	111,15	118,00	136,72	142,54	153,40
4.a. Bangunan	109,26	115,32	131,79	142,06	151,21
4.b. Non-Bangunan	114,60	122,92	145,76	143,42	157,42
5. Perubahan Inventori	277,39	63,61	157,30	103,94	122,75
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	225,55	204,75	79,58	62,92	57,60
6.a. Barang	226,27	204,49	77,44	60,26	54,66
6.b. Jasa	184,17	219,67	202,70	215,18	226,21
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	2.307,80	4.126,47	5.627,31	4.308,15	4.478,30
7.a. Barang	12.117,84	22.106,33	30.490,41	23.134,81	24.079,81
7.b. Jasa	160,27	190,48	184,50	186,78	187,31
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	110,75	76,33	30,12	21,60	17,69
8.a. Ekspor	122,88	149,73	185,18	79,90	70,75
8.b. Impor	114,79	100,77	81,74	41,01	35,35
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	123,52	132,78	141,10	150,80	160,62

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012 - 2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	110,76	116,83	121,43	126,28	129,75
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	112,50	119,99	125,57	132,18	137,60
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	108,70	113,27	117,20	120,52	125,15
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	111,91	118,49	121,56	125,14	126,28
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	114,32	115,52	119,09	122,13	125,96
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	104,60	110,03	114,23	117,70	117,88
1.f. Hotel dan Restoran	108,13	112,62	116,69	119,69	123,82
1.g. Lainnya	110,95	115,91	119,60	123,67	126,90
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	105,78	108,54	111,21	116,22	121,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	106,18	108,18	113,61	118,03	124,17
3.a. Konsumsi Kolektif	107,34	109,49	115,94	120,42	126,81
3.b. Konsumsi Individu	104,54	106,24	110,23	114,54	120,32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,65	102,69	108,88	113,33	116,27
4.a. Bangunan	100,62	102,50	108,54	112,45	114,60
4.b. Non-Bangunan	100,69	103,00	109,45	114,92	119,22
5. Perubahan Inventori	117,05	145,55	135,91	127,24	57,96
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	89,49	100,67	108,64	105,57	107,60
6.a. Barang	89,21	100,35	107,79	103,84	105,52
6.b. Jasa	109,09	117,83	127,22	133,31	136,37
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	133,39	166,30	172,99	130,69	123,76
7.a. Barang	134,86	167,96	173,73	129,95	122,73
7.b. Jasa	108,90	123,99	146,29	150,88	152,70
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	78,14	70,74	18,90	75,01	43,46
8.a. Ekspor	107,89	111,54	105,47	183,51	199,76
8.b. Impor	88,74	90,92	84,19	145,39	147,59
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	108,21	110,54	115,13	120,24	124,75

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2012 - 2016**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6,81	5,48	3,93	3,99	2,75
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,26	6,66	4,65	5,27	4,10
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,44	4,20	3,47	2,83	3,85
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,11	5,88	2,59	2,94	0,91
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,84	1,05	3,10	2,55	3,13
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,03	5,19	3,81	3,04	0,15
1.f. Hotel dan Restoran	3,51	4,15	3,61	2,57	3,45
1.g. Lainnya	6,28	4,47	3,18	3,40	2,62
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,48	2,61	2,46	4,50	4,90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	2,25	1,89	5,01	3,89	5,20
3.a. Konsumsi Kolektif	3,04	2,00	5,89	3,86	5,31
3.b. Konsumsi Individu	1,13	1,63	3,76	3,91	5,05
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	-0,22	2,02	6,04	4,08	2,60
4.a. Bangunan	-0,19	1,87	5,89	3,60	1,92
4.b. Non-Bangunan	-0,29	2,29	6,26	5,00	3,74
5. Perubahan Inventori	7,36	24,34	-6,62	-6,38	-54,45
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-16,86	12,50	7,92	-2,83	1,92
6.a. Barang	-17,17	12,49	7,42	-3,67	1,62
6.b. Jasa	5,24	8,01	7,97	4,79	2,30
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	9,28	24,68	4,02	-24,45	-5,31
7.a. Barang	8,91	24,54	3,43	-25,20	-5,56
7.b. Jasa	9,25	13,86	17,98	3,14	1,21
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-19,91	-9,47	-73,28	296,82	-42,07
8.a. Ekspor	4,05	3,38	-5,45	74,00	8,86
8.b. Impor	-10,85	2,46	-7,41	72,70	1,51
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	3,92	2,15	4,15	4,44	3,75

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
- Badan Pusat Statistik, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
- Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
- Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
- Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
- United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
- United Nations, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
- United Nations, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

United Nations, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 50, New York, 1988.

United Nations, *Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 76, New York, 2000.

Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.

Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993.

<https://sultra.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sultrapbs.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jl. Boulevard No.1 Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp:0401-3135363; Fax:0401-3122355; e-mail:bps7400@bps.go.id
Website:<http://sultra.bps.go.id>

ISBN 978-602-5407-01-7



9 786025 407017